

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503)
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609)
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165)
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533)
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523)
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630)
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6632)
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953)
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2081)
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127)
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501)
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202)
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1077)
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 12)
- Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan, Pemeliharaan, Dan Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 2)
- Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 500-1255 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tentang Tata Cara Pengurusan Hak Dan Penyelesaian Sertipikat Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah
- Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/2022

B. Putusan Pengadilan

- Pengadilan Negeri Bangil, Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 2/Pdt.G/2018/Pn Bil perihal Status Kepemilikan Bidang Tanah Dan Bangunan SDN Bendungan, Kecamatan Kraton, 29 November 2018
- Pengadilan Negeri Bangil, Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 75/Pdt.G/2018/Pn Bil tentang Status Kepemilikan Bidang Tanah Dan Bangunan SDN Semare, Kecamatan Kraton, 21 Mei 2019

C. Buku

- Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Edy Wijayanti, Rina Arum Prastyanti. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Vol. 1. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. 6th ed. Vol. 1. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Ismaya, Samun. 2013. *Hukum Administrasi Pertanahan*. 1st ed. Vol. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. 1st ed. Vol. 1. Jakarta Selatan: Red & White Publishing
- Parlindungan, A.P.. 1994. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. 2nd ed. Vol. 1. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Sumardjono, Maria S.W. 2019. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. 1st ed. Vol. 1. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sumarja, FX. 2010. *Hukum Pendaftaran Tanah (Versi Lengkap)*. Edited by I Gde A.B. Wiranata. 1st ed. Vol. 1. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Suteki, dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*. 1st ed. Vol. 1. Depok: Rajawali Pers.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tehupeiory, Aartje, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses

D. Jurnal

- Ambarita, Arisandy - Politeknik Sains dan Teknologi Wiratama Maluku. 2016. "Analisis Pengembangan Sistem Informasi Pengolahan Aset Dearah (Studi Kasus : Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara)." *Indonesian Journal of Networking and Security (IJNS)*, Volume 5, No.4. <https://doi.org/10.55181/IJNS.V5I4.1439>.
- Ardani, M. N. 2019. "Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi Badan

Pertanahan Nasional”. *Administrative Law and Governance Journal*, Volume 2, No. 3, <https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I3.476-492>

Baskara, Brian. 2014. “Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Aset Daerah Yang Belum Atas Nama Pemerintah Kabupaten Jombang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 Pasal 29 Ayat (1).” *Brawijaya Law Student Journal*, Edisi Februari 2014

Fatimah, Amah, dan Yusro Edy N. 2020. “Kajian Filologis Kajian Flologis Serat Pangrembag Ewah-Ewahan Rarantaman Arta Ing Taun 1925 Karembag Ing Wulan Dhesember 1924”. *Sutasoma : Jurnal Sastra Jawa*, Volume 8, No. 1. <https://doi.org/10.15294/SUTASOMA.V8I1.25284>.

Herman, dan Hendry Julian Noor. 2017. “Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (*Beschikking*)”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 3, No. 1. <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9240>

Indrayanto, (2017). “Perubahan Pokok dalam Peraturan Pendaftaran Tanah Menurut PP Nomor 10 Tahun 1961 Dengan PP Nomor 24 Tahun 1997”. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 36, No. 3, <https://scholar.archive.org/work/ccve3eqecndvxmlxiwzzqvs4y4/access/wa-yback/http://jhp.ui.ac.id:80/index.php/home/article/viewFile/1264/1187>

Maulidiah, Sri. 2017. “Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi Di Daerah.” *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, Volume 3, No. 1. <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1811>.

Ramadhani, Rahmat. 2021. “Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah.” *SOSEK : Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, Volume 2, No. 1: <https://doi.org/10.55357/SOSEK.V2I1.119>.

RAS, Hernawati, dan Joko Trio Suroso. 2020. “Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi indonesia Melalui *Omnibus Law*.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, Volume 4, No. 1: <https://doi.org/10.31955/MEA.V4I1.557>.

Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. 2016. “Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali.” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, Volume 2, No. 2. <https://doi.org/10.22212/JNH.V2I2.218>

E. Skripsi/Tesis

- Indarto, Bayu. 2010. *“Implementasi Kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Dalam Pendaftaran Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”*. Tesis Magister Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Paramita, Yulia. 2022. *“Kedudukan Girik Sebagai Bukti Kepemilikan Atas Tanah Dalam Sengketa Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Sengketa Tanah Aset Kebon Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat)”*, Disertasi Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Priyatin, Aris. 2018, *“Efektivitas Belanja Modal Dan Perolehan Aset Tetap Terhadap Kontribusinya Di Pemerintah Kabupaten Bekasi Pada Tahun 2014-2016”*, Skripsi Program Studi Strata-1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta
- Putri, Betari Wahyu. 2020. *“Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Sukoharjo”*, Skripsi Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

F. Artikel Internet

- Akbar, Emil. "Sertifikasi Aset Tuntas, KPK RI Beri Penghargaan Untuk Kabupaten Pasuruan" [rri.co.id. "https://www.rri.co.id/malang/daerah/102539/sertifikasi-aset-tuntas-kpr-ri-beri-penghargaan-untuk-pemkab-pasuruan"](https://www.rri.co.id/malang/daerah/102539/sertifikasi-aset-tuntas-kpr-ri-beri-penghargaan-untuk-pemkab-pasuruan). (Diakses 18 Desember 2023)
- Pasuruan, Pemerintah Kabupaten. “BPN Kabupaten Pasuruan Serahkan Puluhan Sertifikat Aset Daerah Kepada Bupati Irsyad Yusuf” [pasuruankab.go.id., https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/bpn-kabupaten-pasuruan-serahkan-puluhan-sertifikat-aset-daerah-kepada-bupati-irsyad-yusuf-](https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/bpn-kabupaten-pasuruan-serahkan-puluhan-sertifikat-aset-daerah-kepada-bupati-irsyad-yusuf-), (Diakses 18 Desember 2023)